



ISSN 2685-483X

Volume 4, Issue 2, Juli-Desember 2022

Halaman 119-132



## Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan BUMDes Edupark di Kabupaten Grobogan

Erika Nada Arwana, Atika Wijaya  
Jurusan Sosiologi dan Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Kata Kunci	Abstrak
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	<p>Penelitian ini mencoba melihat taktik yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan perekonomian Desa Cingkrong. Untuk mengimplementasikan konsep ini, De Bale Cingkrong, sebuah usaha desa wisata, memberdayakan penduduk setempat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari prinsip-prinsip panduan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, serta tantangan yang mereka alami dan solusi yang mereka lakukan. Dalam penelitian ini, konsep Najiati dan Prijono tentang pemberdayaan masyarakat digabungkan. Teknik penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah semua bentuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia, pembentukan lembaga kelompok, perluasan usaha yang sejahtera, dan penyebaran pengetahuan yang relevan adalah semua cara yang dipraktikkan oleh taktik pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini meliputi keberlanjutan, partisipasi, kesetaraan, dan kemandirian. Tantangan tersebut antara lain masalah sosial budaya seperti rendahnya kepercayaan yang diselesaikan dengan memastikan keunggulan pariwisata De Bale, masalah ekonomi seperti kekurangan modal yang diselesaikan dengan menggunakan Pendapatan Asli Desa dan pinjaman, dan masalah lingkungan seperti Covid-19 yang diselesaikan dengan pemutusan hubungan kerja sementara, penyemprotan desinfektan, dan mengikuti protokol kesehatan.</p>
De Bale Cingkrong	
Pemberdayaan	
Strategi	
Naskah Awal	17 Juli 2022
Review Pertama	16 Agustus 2022
Revisi Akhir	20 September 2022
Diterima	11 Oktober 2022
Publish	31 Desember 2022



ISSN 2685-483X

Volume 4, Issue 2, July-December 2022

Pages 119-132



## Community Empowerment Strategy Through Strengthening BUMDes Edupark in Grobogan Regency

Erika Nada Arwana, Atika Wijaya  
Jurusan Sosiologi dan Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Keywords	Abstract
Village-owned Enterprises (BUMDes) De Bale Cingkrong Empowerment Strategy	This study's objective is to determine the Village Owned Enterprises' (BUMDes') economic development strategy for Cingkrong Village. By empowering the local populace to promote village tourism under the name De Bale Cingkrong, this strategy is implemented. This study also seeks to identify the guiding principles of BUMDes in community empowerment, as well as the obstacles they encountered and the solutions they implemented. This study employs Priyono and Pranarka's concept of community empowerment, which was inspired by Najati. This study employed qualitative research as its methodological foundation. The data was collected through observation, interviews, and documentation. This study's findings suggest that the community empowerment strategy is implemented through the development of human resources, the establishment of group institutions, the expansion of successful businesses, and the dissemination of relevant information. Existing notions of community empowerment include sustainability, participation, equality, and autonomy. The obstacles included sociocultural issues such as low trust, which were overcome by convincing people of the benefits of De Bale tourism, economic issues such as a lack of capital, which were overcome by utilizing Village Original Income and loans, and environmental issues such as Covid-19, which were overcome by temporary layoffs of employees, application of disinfectants, and adherence to health protocols.
Submission	July 17, 2022
Initial Review	August 16, 2022
Final Revision	September 20, 2022
Accepted	October 11, 2022
Publish	December 31, 2022

## Pendahuluan

Badan usaha milik desa yang sering disebut BUMDes diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang pengelolaan desa. Badan Usaha Milik Desa juga dicakup oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 Tahun 2010 dan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (BUMDes). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes diberi mandat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah sesuai dengan undang-undang ini. Hal ini dimaksudkan agar taraf hidup masyarakat pedesaan dapat meningkat dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah sangat mengharapkan BUMDes ikut berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan sehingga membantu mengurangi permasalahan sosial (Prabowo, 2014; Anggraeni, 2016). Salah satu jalan yang dilakukan pemerintah adalah menambah pendapatan desa melalui Dana Desa (DD). Dana Desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut JPNN (2014) masing-masing desa mendapatkan jatah dana desa sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar.

Menurut data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), terdapat 1.022 BUMDes pada tahun 2014 dan 12.115 pada tahun 2016. (Murdaningsih, 2016). Pada 2017 angka tersebut menjadi 18.446 unit dan 39.000 unit pada 2018. (Winarto, 2018). Meskipun memiliki peningkatan yang cukup drastis tidak semua BUMDes maju dan efektif dikarenakan kegiatan operasionalnya tidak berjalan. Maka dari itu sangat dibutuhkan suatu strategi dalam pengelolaan BUMDes (Zandri, Putri dan Fahmi, 2018).

Beberapa unit BUMDes di Indonesia telah berhasil menerapkan strategi yang efektif membantu perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat. Contohnya BUMDes Sejahtera di Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul dan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Berdasarkan data Sidik (2015) BUMDes Sejahtera berhasil menaikkan PADes (Pendapatan Asli Daerah) dari Rp 3 juta pada tahun 2008-2010 menjadi Rp 68 juta pada tahun 2014. Disusul BUMDes Tirta Mandiri dalam penelitian Syamsuri, dkk. (2018) menampilkan data yang awalnya Rp 100 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 16 miliar ditahun 2018. Data tersebut mengindikasikan bahwa BUMDes yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan ekonomi desa. Namun beberapa wilayah di Indonesia masih belum memiliki BUMDes. Misalnya di Kabupaten Grobogan, masih terdapat enam desa yang belum memiliki BUMDes. Enam desa tersebut yaitu Desa Genuksuran, Desa Padas, Desa Jetaksari, Desa Ngambakrejo, Desa Pelem, dan Desa Tunggulrejo (Suara Merdeka, 2019).

Meski terdapat enam desa yang belum memiliki BUMDes, di Kabupaten Grobogan terdapat satu desa dengan BUMDes yang dianggap berkembang cukup baik dan terkenal dikalangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. BUMDes ini memiliki strategi pemberdayaan unik. BUMDes ini adalah BUMDes Cingkrong Makmur di Desa Cingkrong. Unit usaha wisatanya yang terkenal dikalangan masyarakat Grobogan bernama De Bale Cingkrong.

Strategi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui wisata *edupark* masih jarang dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Grobogan. Desa Cingkrong menjadi salah satu pelopornya. Dengan adanya strategi unik tersebut, BUMDes Cingkrong ini dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain di Grobogan untuk mengembangkan BUMDes dan strategi pemberdayaannya masing-masing. Beberapa hal yang dapat dicontoh dari BUMDes Cingkrong Makmur diantaranya strategi pelaksanaan pemberdayaan, prinsip pemberdayaan dan kendala beserta solusi dalam pemberdayaan di *edupark*.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa strategi yang diambil BUMDes Cingkrong Makmur dalam pemberdayaan masyarakat melalui *edupark* De Bale Cingkrong. Beberapa aspek yang akan dianalisa yaitu strategi dalam menyelenggarakan, prinsip penyelenggaraan dan kendala beserta solusi dalam pemberdayaan. Data penelitian ini dianalisa menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat oleh Prijono dan Pranarka dilengkapi pemikiran Najati.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan menjadi lokasi penelitian ini. Kajian ini berfokus pada prinsip-prinsip BUMDes, strategi BUMDes dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, serta tantangan dan solusi dalam pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan non-partisipan adalah metode yang digunakan. Observasi dilakukan pada rentang waktu Januari 2020 dan sempat terhenti karena terkendala pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan De Bale ditutup sementara. Peneliti menunggu hingga keadaan kembali stabil lalu observasi dilanjutkan lagi pada rentang Juni-Juli 2020. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat keadaan kantor BUMDes, kantor desa, situasi desa, situasi De Bale Cingkrong, serta proses pemberdayaan sebelum dan sesudah masa *new normal*. Masa *new normal* yaitu adaptasi kebiasaan baru pasca adanya virus Covid-19 di Indonesia.

Wawancara dilakukan pada rentang waktu 25 Juni - 29 Juli 2020. Wawancara dilakukan kepada pengurus BUMDes, pendamping desa, warga yang masih bekerja dan sudah tidak bekerja di area De Bale Cingkrong. Pengurus BUMDes yang menjadi informan meliputi penasihat BUMDes (kepala desa) dan bendahara BUMDes guna mendapatkan data tentang BUMDes, kegiatan pemberdayaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, prinsip dan kendala pemberdayaan masyarakat. Wawancara juga dilakukan dengan pendamping desa untuk mendapatkan data tentang pendampingan BUMDes dan kegiatan pemberdayaan.

Proses wawancara lain juga dilakukan dengan informan lima warga yang masih bekerja di area De Bale dan satu orang mantan karyawan De Bale dengan data yang dicari meliputi proses bekerja, kegiatan pemberdayaan masyarakat, manfaat serta kendala dalam bekerja. Foto-foto, Surat Keputusan Kepala Desa Cingkrong, AD/ART BUMDes, dan bentuk dokumentasi lainnya diolah menggunakan pendekatan triangulasi untuk menguji keakuratan data dalam penyelidikan ini. Membandingkan data observasi dengan data wawancara, membandingkan data dari informan yang berbeda, dan membandingkan data observasi dan wawancara dengan dokumen lain merupakan contoh triangulasi sumber. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data merupakan strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Profil BUMDes Cingkrong Makmur

BUMDes berperan penting dalam menjamin kesejahteraan warga desa Desa Cingkrong. BUMDes Cingkrong Makmur yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 2017 merupakan BUMDes yang berada di Desa Cingkrong. BUMDes Cingkrong Makmur didirikan dengan maksud untuk mendorong atau mewadahi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan ini dapat berbentuk inisiatif yang didorong oleh potensi lokal atau inisiatif yang disponsori pemerintah. Pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa BUMDes bebas memilih unit usaha yang ingin dijalankan, asalkan sesuai dengan undang-undang. BUMDes memiliki akses terhadap usaha antara lain perdagangan, jasa, keuangan mikro, dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes memiliki akses terhadap usaha antara lain perdagangan, jasa, keuangan mikro, dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes Cingkrong Makmur mengawal urusan ekonomi desa melalui memaksimalkan peluang pasar lokal, mengelola pariwisata dengan baik, dan mengelola BKD.

### Sejarah Edupark De Bale Cingkrong

Edupark De Bale Cingkrong adalah suatu lokasi wisata baru yang terletak di Desa Cingkrong yang diresmikan pada tanggal 10 April 2019. Wisata ini tergolong wisata edukasi sehingga dapat dikatakan sebagai *edupark*. Sedangkan nama De Bale Cingkrong berasal dari kata De Bale yang diadopsi dari kata Balai karena lokasinya yang berada di area Balai Desa Cingkrong. Awal mula dibangunnya edupark De Bale Cingkrong ini karena ide dari Kepala Desa Cingkrong sekaligus penasihat BUMDes Cingkrong Makmur yang melihat aset desa yaitu berupa kolam tidak terpakai. Selain itu adanya anjuran untuk menghidupkan sektor pariwisata desa juga membuat munculnya inisiatif untuk membangun destinasi wisata dan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.

Mayoritas masyarakat desa bekerja dalam pertanian. Keberadaan pertanian sebagai salah satu sektor utama membuat adanya buruh tani dan buruh harian lepas dengan pekerjaan tidak menentu. Selain itu angka warga yang tidak/belum bekerja juga cukup banyak. Ini yang menjadi salah satu alasan diselenggarakannya pemberdayaan masyarakat melalui wisata. Wisata dapat menyerap tenaga kerja tanpa syarat atau keahlian tertentu sehingga warga yang belum bekerja, petani, buruh tani atau buruh lain dengan pekerjaan tidak menentu dapat mendaftarkan diri.

### Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh BUMDes

Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 165–170), pendekatan pemberdayaan masyarakat dimulai dengan membangun sumber daya manusia, kelembagaan kelompok, perusahaan produktif, dan memberikan informasi yang sesuai. Data yang ditemukan akan dikaji dengan menggunakan pengertian tersebut dalam temuan dan pembahasan. Berikut ini pembahasan mengenai masing-masing taktik secara terpisah.



## **Pengembangan sumber daya manusia**

*EduPark* De Bale Cingkrong telah melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan yaitu masyarakat berdaya dalam aspek pengetahuan dan kemampuan (Suharto, 2005). Warga Desa Cingkrong yang bekerja di *edupark* De Bale Cingkrong diberikan pelatihan. Hal ini karena diawal penerimaan mereka sebagai karyawan, pihak BUMDes tidak menetapkan syarat keahlian tertentu. Walaupun bekerja di lapangan memungkinkan pembelajaran langsung, BUMDes tetap bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian anggota stafnya melalui pelatihan. Hal ini karena salah satu aspek pemberdayaan adalah praktik pemberian pelatihan dan keterampilan (Poeloengasih, et.al. 2014). BUMDes meminta bantuan para profesional untuk memberikan pelatihan di bidang-bidang seperti *public speaking* dan keamanan *outbond*. Selain itu BUMDes bekerja sama dengan pihak Polres Grobogan untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan untuk karyawan berupa edukasi lalu lintas agar diteruskan kepada pengunjung wisata. Kegiatan rutin seperti latihan tari, latihan band, dan kemampuan kreatif lainnya seperti Barongan, dilakukan secara bebas oleh warga Desa Cingkrong dan merupakan salah satu bentuk pengembangan diri yang dilakukan di kawasan wisata. Barongan dilakukan setiap akhir pekan di kawasan wisata tersebut.

*Kalau senin (tiket masuk bagi warga Desa Cingkrong) free mbak. Kalau senin kan sepi pada sekolah mbak. Kalau minggu itu sini lumayan rame kan ada pentas gitu mbak. Yang tampil anak-anak TK dan SD sini. Yang ditampilin tarian. Barongan juga ada. Sebelum tampil biasanya mereka latihan dulu. Latihannya bisa dirumah, bisa di De Bale langsung. (Wawancara dengan Mbak Septi pada tanggal 20 Juli 2020).*

BUMDes mendorong pengembangan diri masyarakat Desa Cingkrong melalui pelatihan mandiri dengan menawarkan lokasi pelatihan. Warga yang tampil mendapat bayaran atas kerja mereka. Pemberdayaan masyarakat yang berbentuk pengembangan SDM merupakan lanjutan dari upaya penyerapan tenaga kerja. Karena unit wisata ini merupakan usaha yang dibentuk untuk membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi para pengangguran. Pembukaan lapangan pekerjaan melalui wisata dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerja yang bekerja di area wisata mencapai 31 orang lebih. Jumlah tersebut terdiri dari latar belakang pengangguran, ibu rumah tangga, bahkan hingga buruh serabutan. Ini mengindikasikan bahwa terdapat realisasi pengurangan pengangguran pada pemberdayaan masyarakat melalui De Bale.

## **Pengembangan kelembagaan kelompok**

Kelompok yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cingkrong adalah BUMDes Cingkrong Makmur. BUMDes Cingkrong Makmur sebagai inisiator pemberdayaan masyarakat terus melakukan pengembangan sumber daya manusianya agar menjadi lebih baik. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia dapat menjadi pendorong maupun kendala keberjalanan BUMDes (Winarto, 2018). Cara yang ditempuh BUMDes yaitu melalui mengikuti seminar, pelatihan dan studi banding. Selain mengembangkan diri sendiri supaya lebih baik melalui berbagai cara, BUMDes Cingkrong Makmur juga masih didampingi. Pendampingan yang didapat berasal dari pendamping desa. Pendampingan dari pendamping desa meliputi pendampingan dalam hal administrasi.

Selain itu, BUMDes Cingkronng Makmur juga mengajak kelembagaan kelompok lain seperti PKK dan Pokdarwis. Tujuannya supaya kelembagaan tersebut berkembang dan turut bergabung dalam program pemberdayaan masyarakat. PKK dan Pokdarwis ikut diberdayakan dengan cara diajak untuk ikut mengembangkan wisata *edupark* De Bale. Karena awalnya kedua kelompok tersebut pasif sehingga perlu dikembangkan dan diajak bersinergi bersama. PKK diajak untuk menggerakkan masyarakat agar menjual produknya di De Bale. Sementara Pokdarwis diajak untuk ikut memikirkan keberlanjutan wisata di Desa Cingkronng.

### **Pengembangan usaha produktif**

BUMDes Cingkronng Makmur juga mengupayakan agar warganya lebih produktif dan mengembangkan usahanya dalam bentuk apapun. Selain dengan cara menggandeng PKK untuk mendorong warganya produktif dan menjual produknya di De Bale, BUMDes juga melakukan upaya lain. Upaya lain yang dilakukan agar warganya produktif yaitu dengan memfasilitasi warga yang ingin membuka usaha di area wisata. Selain cenderamata atau oleh-oleh, dagangan dalam bentuk lain juga difasilitasi BUMDes untuk dijual di area wisata seperti minuman dan jajanan instan. Tempat lapak-lapak khusus untuk warga melapakkan dagangannya juga disiapkan oleh BUMDes. Usaha lain yang dijalankan warga Desa Cingkronng berupa usaha-usaha jasa seperti parkir dan fotografi.

### **Penyediaan informasi tepat guna**

Upaya publikasi yang dilakukan BUMDes Cingkronng Makmur dilakukan melalui jalur *online* dan jalur *offline*. Facebook, Instagram, dan YouTube hanyalah beberapa contoh situs media sosial yang digunakan untuk promosi saluran *online*. Namun akun youtube tersebut bukan milik BUMDes. Akun-akun tersebut milik orang lain yang secara tidak langsung membantu promosi De Bale Cingkronng. Selain itu, BUMDes Cingkronng Makmur juga mencoba strategi pemasaran secara *offline* dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan pemasangan baliho di jalan raya dan penyebaran brosur ke pengunjung yang datang ke De Bale. Cara lain yang dilakukan BUMDes yaitu dengan strategi mendatangi langsung suatu tempat untuk melakukan promosi. Tempat tersebut berupa TK (Taman Kanak-Kanak) dan SD (Sekolah Dasar).

Proses pemberdayaan yang difasilitasi BUMDes Cingkronng Makmur memiliki kaitan dengan penelitian Apriyani (2016) yang juga melihat pemberdayaan melalui BUMDes. BUMDes sebagai pihak pembuat strategi sekaligus pelaksana strategi harus menata program sedemikian rupa agar dapat menyejahterakan warga melalui program pemberdayaan. Diantaranya beberapa strategi tersebut membuka lahan parkir, pelatihan, penambahan tenaga, pemasangan cctv dan penambahan objek. Hampir semua hal tersebut telah dilakukan BUMDes Cingkronng Makmur. Upaya lain agar pengunjung yang datang meningkat jumlahnya dapat terangkum dalam tiga hal yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenities (Yanuar dan Niswah, 2019).

Pertama, atraksi yang ada disesuaikan dengan suatu ciri khas. BUMDes Cingkronng Makmur telah melakukannya dengan cara menampilkan atraksi khas yang sesuai tema *fun and education* yaitu dengan menampilkan kesenian-kesenian tradisional dan menyediakan berbagai wahana permainan yang mendidik. Kedua, aksesibilitas yang berkaitan dengan kemudahan pengunjung dalam akses ke tempat wisata.

BUMDes telah memikirkan kemudahan akses pengunjung melalui pemasangan baliho yang secara tidak langsung menjadi petunjuk lokasi. Ketiga, amenities yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di area wisata juga telah dipertimbangkan kelengkapannya. Misalnya sarana-prasarana keamanan *outbound*. Lebih lanjut terdapat strategi lain yang menjadi langkah BUMDes dalam pemberdayaan yaitu pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi (Kirowati dan Lutfiyah, 2018; Setiawan dan Komalasari, 2020). Ini menunjukkan bahwa di setiap tempat BUMDes memiliki strategi pemberdayaan yang berbeda-beda.

Wisata edupark De Bale Cingkrong tergolong wisata dengan jumlah pengunjung yang banyak pada tahun pertama beroperasi apabila dibandingkan dengan wisata lain seperti wisata Umbul Pongok di Klaten. Wisata Umbul Pongok Klaten hanya memiliki 5.362 pengunjung di tahun pertama beroperasi yaitu tahun 2010 (Kiswanto dan Susanto, 2019). Sedangkan De Bale Cingkrong memiliki jumlah pengunjung mencapai 174.339 pada tahun pertama beroperasi yaitu 2019. Jumlah kunjungan wisatawan dapat dijadikan indikator keberhasilan pariwisata (Sunarjaya, dkk. 2018). Sehingga jumlah pengunjung di tahun pertama De Bale beroperasi mengindikasikan wisata De Bale cukup berhasil dengan jumlah pengunjung melebihi wisata Umbul Pongok di tahun pertama beroperasi.

## **Prinsip Pemberdayaan Masyarakat di *Edupark* De Bale Cingkrong**

### **Menciptakan kesetaraan**

Kesetaraan dalam hal ini mengacu pada kesamaan derajat dalam masyarakat ketika melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Tidak ada satu pihak yang lebih tinggi maupun lebih rendah antara satu sama lain. Dalam pemberdayaan masyarakat di *edupark* De Bale Cingkrong, BUMDes Cingkrong Makmur telah berusaha menciptakan kesetaraan. Terdapat kesetaraan antar gender dan golongan, ini dimaksudkan kesetaraan berlaku untuk laki-laki dan perempuan, serta golongan tua maupun muda. Semua gender dan golongan diperbolehkan bekerja di area wisata. Salah satu kesetaraan yang sangat penting yaitu kesetaraan gender. Di Indonesia populasi perempuan dan laki-laki hampir sama sehingga perempuan juga perlu dimanfaatkan untuk pembangunan (Arsal, et.al. 2017). Perempuan juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi tenaga produktif.

*Kalau dulu saya diajak sih mbak. Tiba-tiba saja saya disuruh ke balai desa. Pokoknya siapa yang mau itu bisa langsung ke Bu Lurah, nanti didata sama Mbak Mia (sekertaris BUMDes). Mau itu mendaftar karyawan maupun mendaftar berdagang di lapak. Semua warga Cingkrong boleh mendaftar. Kan memang ini dibuka untuk warga desa sini. (wawancara dengan Mas Joko pada tanggal 25 Juni 2020).*

Selain itu, *edupark* De Bale Cingkrong juga menegakkan kesetaraan antar pihak yang berbeda. BUMDes Cingkrong Makmur yang secara legalitas sebenarnya berada di atas masing-masing unit usaha termasuk di atas *edupark* De Bale Cingkrong, tidak segan untuk ikut ambil bagian membantu pekerjaan di De Bale. Semuanya saling membantu dan gotong-royong, tanpa pilih-pilih karena semua dianggap setara. Berbagai pihak baik BUMDes dengan karyawan maupun karyawan dengan karyawan, berada diposisi yang setara.



## **Mengajak partisipasi warga**

Proses perencanaan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat, agar masyarakat memahami program yang akan dilaksanakan (Ridhwan & Wijaya, 2019). Selain itu dengan adanya pelibatan masyarakat juga dapat menimbulkan rasa sadar untuk terlibat dalam setiap kegiatan dan adanya rasa kepemilikan bersama dalam suatu program, sehingga akan berkontribusi dalam keberhasilan program (Munawaroh & Hendrastomo, 2021). Dalam perencanaan *edupark* De Bale Cingkrong telah mengikutsertakan masyarakat dalam hal usulan atau aspirasi yang dilakukan dengan proses terstruktur. Dimulai dari usulan yang ditampung saat rapat RT, lalu dibawa ke kadus kemudian dibawa ke musyawarah desa. Ini juga terjadi ketika ada usulan pengelolaan lahan parkir. Awalnya BUMDes Cingkrong Makmur menetapkan lahan parkir untuk dikelola langsung oleh BUMDes namun kemudian ada usulan dari masyarakat agar pengelolaan parkir diberikan kepada masyarakat. Hal ini sudah seharusnya terjadi karena dalam pemberdayaan, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengaturan program (Rini, et.al. 2019).

*Parkir itu kan punya warga dan pengelolanya warga. Itu halaman punya warga. Dari De Balenya malah enggak ada parkirnya. Awalnya memang BUMDes berencana agar parkir sekalian jadi pemasukan De Bale. Kita siapkan karyawan untuk kelola parkir. Tapi ada usulan masuk, agar parkir dikelola warga sini. Kita terima usulnya, dan kita ubah rencana awalnya. (wawancara dengan Mbak Ana pada tanggal 26 Juni 2020).*

Selain dalam hal perencanaan, partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dalam hal pelaksanaan. Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan dapat berupa bentuk material, tenaga, maupun informasi. Apabila di *edupark* De Bale Cingkrong bentuk partisipasi yang dapat ditemukan dalam proses pelaksanaan adalah partisipasi dalam bentuk tenaga. Hal ini karena dalam pelaksanaan semuanya dikelola sendiri oleh BUMDes dan masyarakat. Baik dalam kelompok restoran, kelompok pedagang dalam lapak dan kelompok mitra usaha. Bahkan BUMDesnya juga semuanya warga asli Desa Cingkrong. Jadi program pemberdayaan masyarakat di De Bale benar-benar berasaskan “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi di *edupark* De Bale Cingkrong berjalan sangat kooperatif dengan masyarakat. Dalam hal ini, BUMDes mempersilahkan warga untuk ikut serta mengawasi dan memberikan masukan atau usulan kepada De Bale.

## **Mengupayakan kemandirian**

Proses pemberdayaan menurut Verhagen dalam Najiati et al. (2005), mbingkai masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan kemampuan, meskipun terbatas. Untuk itu kemampuan tersebut perlu dimanfaatkan, agar masyarakat menjadi mandiri. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan kemampuan yang dimilikinya, tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain.

Pandangan tentang keswadayaan ini sebenarnya sejak awal sudah ada saat perencanaan *edupark* De Bale Cingkrong, pihak BUMDes Cingkrong Makmur tidak menunggu bantuan dari pemerintah untuk membangun destinasi wisata. Destinasi wisata ini terealisasi berdasarkan upaya BUMDes Cingkrong Makmur bersama warga Cingkrong sendiri, bahkan modal pelaksanaannya memanfaatkan PADes dan mencari pinjaman kepada pihak ketiga. Selain keswadayaan dalam hal permodalan

desa, keswadayaan dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat asli Desa Cingkong terjadi di *edupark* De Bale Cingkong. Masyarakat bukan sekedar diberikan bantuan yang membuat mereka ketergantungan, namun kemampuan dan potensi masyarakat dimanfaatkan di *edupark* De Bale Cingkong dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk bekerja di De Bale sesuai kemampuannya. Dengan bekerja di *edupark* De Bale Cingkong mereka memanfaatkan potensi yang dimilikinya, baik tenaga maupun keterampilan. Masyarakat yang bekerja di De Bale mendapat penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pokok secara mandiri.

*Sebelum bekerja di bidang photography (di area De Bale) kerjaan saya di jasa renovasi. Untuk nominal bisa di katakan lebih banyak cuma tidak bisa terus-terusan ada. Misal 3 bulan kerja 1 bulan nganggur. Saya masuk ke jasa fotografi berawal dari hobby. Tidak sebegitu wah seperti di bidang renovasi cuman setiap hari ada pemasukan. Dan Alhamdulillah bisa cukup buat makan sehari-hari (wawancara dengan Mas Angko pada tanggal 29 Juli 2020).*

Dengan bekerja di *edupark* De Bale warga Desa Cingkong mendapat penghasilan tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat mendefinisikan dan memenuhi kebutuhannya (Najiati, dkk. 2005). Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya menunjukkan kondisi masyarakat tersebut memiliki kesejahteraan (Marsela dan Wijaya, 2020).

### **Mengagendakan keberlanjutan**

Pelibatan masyarakat terhadap berbagai tahapan program pemberdayaan bukan hanya akan melatih warga untuk mandiri, namun akan menumbuhkan rasa kepemilikan warga terhadap program pemberdayaan tersebut. Rasa kepemilikan dan keterlibatan terhadap program pemberdayaan masyarakat akan mendorong warga untuk menjaga agar program tetap terjaga dan berkelanjutan. Sehingga, ke depannya terdapat rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat atas kegiatan yang telah dirintis Bersama (Prasetyo & Anggaunitakiranantika, 2019). Selain melibatkan warga dalam berbagai proses pemberdayaan, upaya lain yang dilakukan BUMDes Cingkong Makmur dalam rangka keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat adalah terus melakukan perawatan, inovasi dan merencanakan pelatihan lainnya.

*Ini sih mbak kita melakukan pengembangan kayak misalnya penambahan saung atau rumah kecil untuk berteduh di area sini. Dan penambahan bentuk spot-spot foto supaya De Bale tidak membosankan dan ditinggalkan pengunjung. (wawancara dengan Mbak Ana pada 26 Juni 2020).*

Perawatan yang dilakukan BUMDes meliputi merawat fasilitas-fasilitas yang ada seperti alat-alat permainan tradisional, pembersihan kolam, dan perbaikan area hijau. Kegiatan inovasi yang dilakukan BUMDes berupa pembenahan dan penambahan fasilitas yang ada supaya lebih menarik. Sementara pelatihan lain yang akan ditambahkan yaitu rencana pelatihan membuat untuk karyawan De Bale. Program keberlanjutan lain yang akan diadakan yaitu program desa wisata. Desa wisata berisi destinasi wisata *edupark* De Bale Cingkong, agrowisata dan arung jeram yang masing-masing berada di dusun berbeda.

BUMDes Cingkong Makmur telah mempraktekkan konsep pemberdayaan masyarakat, menurut hasil peneliti lapangan. BUMDes telah menerapkan asas pemberdayaan yang merupakan komponen dari gagasan pemberdayaan masyarakat. Menerapkan ide ini akan membuat lebih mudah untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu untuk memilih tindakan mereka sendiri dan membuat keputusan untuk diri mereka sendiri (Rifa'i, 2013). Keempat konsep tersebut sering diterapkan untuk pencapaian pemberdayaan masyarakat, menurut Najati et al. (2005).

## **Kendala dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat**

### **Aspek sosial budaya**

Menurut Najati, et.al. (2005), permasalahan dalam aspek sosial-budaya dapat meliputi modal sosial rendah, potensi konflik, dan sering terjadinya wabah penyakit. Adanya indikasi modal sosial yang rendah diawal perencanaan *edupark* De Bale Cingkong menjadi kendala tersendiri bagi BUMDes Cingkong Makmur. Modal sosial yang rendah dalam konteks ini meliputi masalah kepercayaan.

Ketika awal perencanaan *edupark* De Bale Cingkong sempat terjadi pertentangan pendapat antara beberapa pihak. Pertentangan pendapat tersebut terjadi disebabkan kurangnya kepercayaan terhadap pembangunan wisata sebagai sarana penggerak ekonomi desa. Kurangnya kepercayaan ini mengindikasikan modal sosial yang rendah dikalangan masyarakat Desa Cingkong. Dalam menghadapi kendala berupa kurangnya kepercayaan tersebut, BUMDes Cingkong Makmur terus berdiskusi dan meyakinkan pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar memiliki kepercayaan terhadap prospek dan manfaat *edupark* De Bale Cingkong.

### **Aspek ekonomi**

Terbatasnya modal adalah hasil dari masalah ekonomi. Salah satu aspek pendukung yang sangat penting bagi pemberdayaan masyarakat adalah permodalan, karena prosesnya sulit dijalankan tanpa uang. Minimnya dukungan dari pemerintah—baik pemerintah pusat maupun kabupaten—merupakan penyebab kekurangan modal. Pembangunan De Bale Cingkong dilakukan secara mandiri menggunakan dana yang diambil dari PADes Cingkong. Meski PADes kurang, BUMDes mencari jalan lain yaitu dengan melakukan pinjaman. Disisi lain, Dana Desa tidak digunakan karena terdapat ketakutan kesalahan administrasi. Detailnya regulasi dana desa dan kurang terampilnya sumber daya manusia dari pihak BUMDes membuat BUMDes memilih meminjam pada pihak ketiga agar permodalan tercukupi.

### **Aspek lingkungan**

Kendala aspek lingkungan yang muncul dan menghambat keberjalanannya *edupark* De Bale Cingkong wujudnya sangat kecil yaitu virus. Virus merupakan mikroorganisme bagian dari alam atau lingkungan yang dapat menginfeksi makhluk hidup lainnya dan bersifat parasit. *Coronaviruses* (Cov) menginfeksi sistem pernapasan dan infeksi virus ini disebut Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang semakin meluas membuat dimunculkannya kebijakan *Work From Home* (WFH) dan penutupan berbagai sektor termasuk sektor wisata. Termasuk *edupark* De Bale Cingkong juga tutup untuk mengurangi penyebaran virus. Wisata De Bale baru dibuka saat pemerintah mengeluarkan kebijakan *new normal* (masa adaptasi

kebiasaan baru). Langkah BUMDes dalam mengantisipasi Covid-19 salahsatunya yaitu dengan pemutusan hubungan kerja sementara. PHK yang dilakukan BUMDes sifatnya sementara. Apabila pandemi Covid-19 mereda dan pemasukan kembali stabil maka karyawan akan dipekerjakan kembali. Langkah lain yang ditempuh BUMDes Cingkronng Makmur agar wisata boleh tetap berjalan adalah dengan penyemprotan disinfektan agar area wisata menjadi steril. Dalam rangkaantisipasi Covid-19 area wisata juga melakukan penerapan protokol kesehatan berupa jaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

## Simpulan

Strategi BUMDes Cingkronng Makmur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui *edupark* De Bale Cingkronng mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Lebih dari 31 orang warga desa dengan latar belakang pengangguran, buruh, dan ibu rumah tangga terserap bekerja di area wisata. Dengan demikian tujuan pemberdayaan tercapai karena BUMDes membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan merupakan strategi yang tepat karena berhasil menciptakan masyarakat yang mandiri.

Prinsip pemberdayaan berupa kesetaraan menciptakan iklim ekonomi yang sehat karena semua memiliki akses dan kedudukan yang sama. Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya dan kekuasaan untuk ikut ambil bagian dalam pemberdayaan. Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa dengan ikut berpartisipasi masyarakat dapat menjadi mandiri dalam menentukan tindakan dan memenuhi kebutuhan. Prinsip keberlanjutan dapat membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya di waktu kini dan di waktu mendatang. BUMDes Cingkronng Makmur yang pada hakikatnya berisi masyarakat Desa Cingkronng membutuhkan bantuan dan kepercayaan masyarakat Desa Cingkronng lainnya untuk dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Anggraeni, Maria R.R.S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal MODUS*, 28(2), 155-167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Apriyani, S. A. (2016). Strategi badan usaha milik desa tirta mandiri dalam pengelolaan objek wisata umbul ponggok di kecamatan polanharjo kabupaten klaten. *Adinegara*, 5(8).
- Arsal, T., et.al. (2017). Bakul: Contribution of Rural Women to Family Economy through Informal Sector Activities. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9(1), 136-142. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.8906>
- JPNN. (2014). Dana Rp 1 Miliar per Desa Kemungkinan Cair Juli. <https://www.jpnn.com/news/dana-rp-1-miliar-per-desa-kemungkinan-cair-juli>. (11 Desember

2019)

- Kirowati, Dewi & Lutfiyah D. S. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 3(1).
- Kiswanto, A., & Susanto, D. R. (2019). Pengaruh Sarana Dan Prasarana Pendukung Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Umbul Pongok, Klaten. *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 10(2) <https://doi.org/10.31294/khi.v10i2.6373>
- Marsela, A. S., dan Wijaya, A. (2020). Dampak Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Jurnal Solidarity*, 9(1), 848-856.
- Munawaroh, S. dan Hendrastomo, G. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kampung Anggur Plumbungan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(2), 118-128. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i2.56>
- Murdaningsih, D. (2016). Jumlah BUMDes Naik 12 Kali Lipat. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/desa-membangun/o714km368/jumlah-bumdes-naik-12-kali-lipat>. (11 Desember 2019)
- Najiati, Sri., dkk. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: E-book Wetlands International.
- Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
- Poeloengasih, C. D., et.al. (2014). Coastal Community Empowerment in Processing *Kappaphycus Alvarezii*: A Case Study in Ceningan Island, Bali, Indonesia. *Journal of Applied Phycology*, 26(3), 1539-1546. <http://dx.doi.org/10.1007/s10811-013-0153-x>
- Prasetyo, J. A., & Anggaunitakiranantika, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera di Kampung KB. *SOSIETAS*, 10(2), 834-840.
- Prijono & Pranarka. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta : Centre Of Strategic And International Studies.
- Ridhwan, H. F. E., & Wijaya, A. (2019). Pengembangan Kampung Jawi sebagai Destinasi Wisata di Kota Semarang. *Jurnal Solidarity*, 8(2), 668-680.
- Rifa'i, Bachtar. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal*



*Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1).

- Rini, H. S., Wijaya, A., Ridhwan, HFE., & Syarifah, NH. (2019). Community Participation Towards A Sustainable Thematic Kampung in Semarang. In *Proceedings of the 1st International Conference on Environment and Sustainability Issues*, ICESI 2019, 18-19 July 2019, Semarang, Central Java, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2290298>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Suara Merdeka. (2019). Enam Desa Belum Memiliki BUMDes. <https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/197023/enam-desa-belum-miliki-bumdes>. (15 Maret 2019)
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sunarjaya, I Gede, et.al. (2018). Kendala Pengembangan Desa Wisata Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 4(2), 215-227. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.v04.i02.p04>
- Syamsuri, H., et.al. (2018). Peningkatan Daya Saing Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDES Tirta Mandiri. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 224-229.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 3 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Winarto, Yudho. (2018). Saat Ini Jumlah Bumdes Telah Meningkat Menjadi 39.000. <https://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlah-bumdes-telah-meningkat-menjadi-39000>. (11 Desember 2019).
- Yanuar, Ferdinan Rakhmad, & Niswah, F. (2019). Strategi Bumdes Dalam Peningkatan Kunjungan Wisata Negeri Atas Angin Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 7(2). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n2.p%25p>
- Zandri, L. P., Putri, N. D. N., & Fahmi, R. A. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dharma Utama. Working Paper Keuangan Publik Islam, No. 9 Seri 1.